



This is an open access article under
CC-BY-SA license

* Corresponding Author

MODAL SOSIAL DAN KEWIRALEMBAGAN DALAM PROGRAM HUTAN SOSIAL OLEH PT PAITON ENERGI

Nuril Endi Rahman¹, Malik Ibrahim², Ferra Wulan Saputri³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Madiun, Indonesia

Email: ¹ ner847@ummad.ac.id, ² mi747@ummad.ac.id, ³ ferrawulans@gmail.com

Abstract. *The social forest programme is one of the important pillars of development that contributes to reducing land tenure inequality and alleviating poverty, which refers to the principles of the green economy. This study aims to describe the management of social forest programmes that utilise social capital by KTH Ranu Makmur and Alam Subur, and describe the extent of the institutional factors applied by KTH Ranu Makmur and Alam Subur in managing social forests. The research method used qualitative case study method. Data collection techniques used participatory observation, in-depth interviews, FGDs and document studies. Data analysis was conducted inductively with the stages of data reduction, data organisation, memoing and coding, data categorisation and empirical generalisation. The results showed that in its implementation, KTH Ranu Makmur and Alam Subur, which had previously existed, utilised social capital as a group strength in managing forest land for agriculture. The institutional factor is also a reinforcement for the group, with the social orientation that makes the group more resilient. The utilisation of social capital by Ranu Makmur and Alam Subur groups makes it easier for the group to deal with various problems such as difficulties in agricultural raw materials, with the network owned by the group, the members of KTH can provide information related to access to agricultural raw materials such as fertilisers and coffee plant seeds. Social capital owned by KTH is also reflected in agricultural activities, such as during the planting period where group members help each other to reduce costs. The social forest programme, especially for Ranu Makmur and Alam Subur, has contributed to poverty alleviation and forest conservation.*

Keywords: *Social forest; social capital; entrepreneurship.*

Abstrak. *Program hutan sosial merupakan salah satu pilar penting pembangunan yang berkontribusi untuk mengurangi ketimpangan penguasaan lahan dan mengentaskan kemiskinan, yang mengacu pada prinsip ekonomi hijau. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pengelolaan program hutan sosial yang memanfaatkan modal sosial oleh KTH Ranu Makmur dan Alam Subur, dan menggambarkan sejauhmana faktor kewirausahaan yang diterapkan oleh KTH Ranu Makmur dan Alam Subur dalam mengelola hutan sosial. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan teknik observasi partisipatif, wawancara mendalam, FGD, dan studi dokumen. Analisis data penelitian dilakukan secara induktif dengan tahapan reduksi data, pengorganisasian data, pembacaan memoing dan koding, kategorisasi data dan generalisasi empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya KTH Ranu Makmur dan Alam Subur yang sebelumnya telah eksis, kemudian memanfaatkan modal sosial sebagai kekuatan kelompok dalam mengelola lahan hutan untuk pertanian. Faktor kewirausahaan juga menjadi penguat bagi kelompok, dengan adanya orientasi sosial sehingga menjadikan kelompok lebih memiliki resiliensi. Pemanfaatan modal sosial oleh KTH Ranu Makmur dan Alam Subur memudahkan kelompok dalam menghadapi berbagai persolan seperti kesulitan bahan baku pertanian, dengan adanya jaringan yang dimiliki oleh kelompok maka antar anggota KTH dapat saling memberikan informasi terkait akses bahan baku pertanian seperti pupuk dan benih tanaman kopi. Modal sosial yang dimiliki oleh KTH juga tergambar dalam aktivitas pertanian, seperti pada saat masa tanam di mana antar anggota kelompok saling membantu sehingga dapat menekan biaya. Program hutan sosial khususnya bagi KTH Ranu Makmur dan Alam Subur, telah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan menjaga kelestarian hutan.*

Kata Kunci: *Hutan sosial; modal sosial; kewirausahaan.*



PENDAHULUAN

Selama ini kemajuan suatu negara hanya diukur dengan indikator ekonomi, sedangkan aspek ekologi dan pemerataan belum menjadi indikator kemajuan ekonomi dan kesejahteraan, sehingga kekuatan antroposentris masih mendominasi dalam arus pembangunan yang menyebabkan terjadinya krisis ekologi (Mikhno et al., 2021; Institutional et al., n.d.). Seiring dengan seriusnya ancaman krisis ekologi dan perubahan iklim, paradigma pembangunan bergeser pada konsep ekonomi hijau, yang memastikan ketersediaan sumber daya alam yang menjadi indikator penting kemakmuran negara (Hari Kristianto, 2020).

PT. Paiton Energy sebagai entitas bisnis yang memiliki kewajiban melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), mencoba menciptakan inovasi program yakni program hutan sosial yang bertujuan mengentaskan kemiskinan bagi masyarakat di sekitar perusahaan. Inovasi program hutan sosial mengacu pada konsep *green economy*, yang diartikan sebagai sikap pro-aktif perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis yang memperhatikan keselamatan ekologi (Marco-Fondevila et al., 2018). Dalam praktiknya, program hutan sosial diserahkan pengelolaannya kepada Kelompok Masyarakat Perhutanan Sosial (KUPS) yakni Ranu Makmur dan Alam Subur yang dianggap memiliki potensi modal sosial yang kuat. Modal sosial merupakan aset sosial yang terdiri dari kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang membuat sebuah aktivitas lebih terkoordinasi, efisien, dan produktif (Kurnianto Tjahjono, 2017), (Subagyo & Legowo, 2021).

Pengelolaan hutan yang diserahkan kepada kelompok usaha KUPS Ranu Makmur dan Alam Subur, juga bisa ditinjau dari dimensi kewiralembagaan yang merupakan lembaga ekonomi tertentu di mana masyarakat menjadi

inovator dan agen perubahan (Kusworo, 2015); Sucipto & Zulkifli, 2021). Dalam kewiralembagaan, relasi sosial kelompok dengan eksternal juga merupakan elemen kunci, sebagai upaya kelompok untuk memperluas peluang pasar (Hardy & Maguire, 2018). Melalui konsep kewiralembagaan, kelompok memiliki kewenangan penuh atas aktivitas usahanya (Susetiawan dkk, 2022).

Dalam konteks KUPS Ranu Makmur dan Alam Subur, yang diberikan kepercayaan penuh untuk mengelola program hutan sosial, peranan praktik kewiralembagaan merupakan variable kesuksesan yang tidak bisa dipisahkan. Penerapan praktik kewiralembagaan akan menciptakan kemitraan strategis, sehingga aktivitas bisnis kelompok mengalami keberlanjutan (Gasbarro et al., 2018).

Program hutan sosial yang menggunakan pendekatan *bottom up* yakni, menyerahkan sepenuhnya pengelolaan hutan kepada masyarakat, yang dianggap memiliki potensi untuk mengelola hutan dalam menghadirkan manfaat ekonomi yang berpegang pada prinsip ekonomi hijau, namun tantangan terbesarnya adalah dalam pendekatan *bottom up* kapasitas masyarakat sebagai pelaksana program masih dipertanyakan.

Dengan memperhatikan uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa persoalan: (1) Bagaimana gambaran modal sosial KUPS Ranu Makmur dan Alam Subur dalam mengelola hutan sosial? (2) Bagaimana wujud praktik kewiralembagaan KUPS Ranu Makmur dan Alam Subur dalam pengelolaan hutan sosial?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis studi kasus, yang merupakan desain penelitian untuk menyelidiki secara cermat suatu program dan berbagai fenomena sosial (Creswell, 2017). Penelitian ini bertujuan

menganalisis dampak pelaksanaan program perhutanan sosial, yang diinisiasi oleh PT. Paiton Energy sebagai bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), di mana dalam pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Tani Hutan Ranu Makmur dan Alam Subur, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *snowball*, yakni pemilihan informan yang terus berkembang berdasarkan rekomendasi dari informan kunci. Dalam penelitian ini, informan kunci penelitian ialah perwakilan divisi Comdev PT. Paiton Energy sebanyak 3 orang, informan kunci berikutnya ialah ketua dan pengurus KTH Ranu Makmur dan Alam Subur dengan yang masing-masing terdiri dari 3 orang, sehingga total informan kunci dalam penelitian sebanyak 9 orang informan. Penggalan data dengan *Focus Grup Discussion*, dilakukan kepada seluruh anggota kelompok KTH Ranu Makmur dan Alam Subur yang secara keseluruhan berjumlah 20 orang.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif yakni, interpretasi atau analisis data dilakukan oleh peneliti sejak dalam proses pengumpulan data lapangan (Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, 2012). Tahapan analisis penelitian meliputi pengorganisasian data, pembacaan memoing dan koding (Creswell, 2017), mendeskripsikan dan membuat kategorisasi data, interpretasi data dan generalisasi naturalistik, penyajian dan visualisasi data yang berupa narasi mendalam tentang gambaran modal sosial dan kewirausahaan dalam pengelolaan hutan sosial oleh KTH Ranu Makmur dan Alam Subur. Untuk memperoleh keabsahan data menggunakan teknik triangulasi, yang merupakan sebuah pendekatan untuk memperoleh tingkat kebenaran yang tinggi dengan menggabungkan antara teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi (Neuman, 2013). Dalam penelitian ini,

keabsahan data diperoleh dari informan yang sama, melalui penyilangan teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi dan triangulasi waktu.

HASIL DAN DISKUSI

Kelompok Tani Hutan (KTH) Alam Subur dan Ranu Makmur merupakan KTH yang menerima konsesi pengelolaan hutan dengan total luas 750 hektar hutan yang kondisinya kritis gersang dan belum dimanfaatkan. Adanya kondisi lahan hutan yang gersang dan kritis tersebut kemudian memunculkan inisiatif dari PT. Paiton Energi untuk memanfaatkan lahan hutan menjadi lahan produktif, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk meningkatkan perekonomian mereka. Pemanfaatan lahan hutan melalui program inovasi sosial perusahaan juga ditujukan untuk mendukung perusahaan dalam menciptakan energi bersih melalui biomassa. Kelompok Tani Hutan (KTH) Ranu Makmur dan Alam Subur kemudian dijadikan sebagai mitra dalam mengelola hutan sosial. Tujuan pelaksanaan program hutan sosial oleh PT. Paiton Energi selain untuk mengentaskan kemiskinan ialah, untuk memenuhi kebutuhan sumber energi biomassa yang saat ini menjadi kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Gambar 1. Aktivitas KTH Ranu Makmur dan Alam Subur



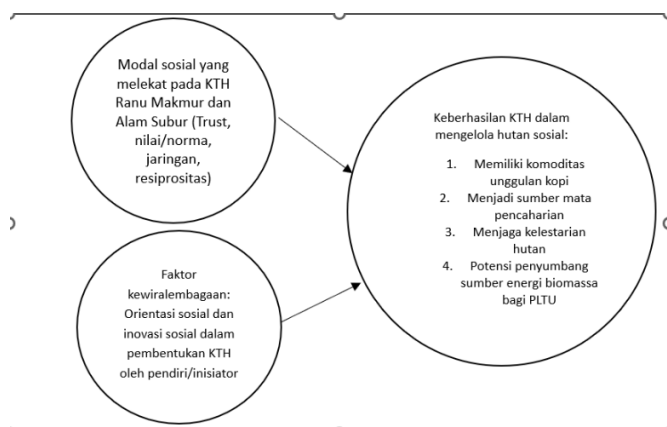
Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2024

Gambaran Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan Sosial Oleh KTH Ranu Makmur dan Alam Subur

Pengelolaan hutan sosial oleh KTH Ranu Makmur dan Alam Subur dilakukan secara swakelola dengan memanfaatkan modal sosial

yang dimiliki oleh kelompok. Dalam pelaksanaannya KTH Ranu Makmur dan Alam Subur juga menerapkan prinsip kewiralembagaan yakni, kelompok berusaha menciptakan berbagai inovasi seperti penanaman tanaman lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta menjalin relasi bisnis atau mitra secara mandiri. KTH Ranu Makmur dan Alam Subur sebagai kelompok masyarakat yang telah lama eksis, masih tetap menjaga nilai-nilai modal sosialnya. Unsur *trust* (kepercayaan) yang kuat dalam KTH Ranu Makmur dan Alam Subur, sesama anggota kelompok memiliki kepercayaan dalam hal pengelolaan demikian halnya kepercayaan kepada ketua, para anggota kelompok mempercayai bahwa ketua kelompok dapat membawa KTH menjadi lebih berkembang dengan kapasitas yang dimiliki.

Gambar 2. Taksonomi Modal Sosial dan Kewiralembagaan dalam Program Hutan Sosial



Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Pemanfaatan modal sosial dalam pembangunan masyarakat sangat penting karena dengan modal sosial akan memungkinkan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan mudah dan kolektif, modal sosial dapat menjadi roda penggerak untuk membantu mobilitas masyarakat dan modal sosial sangat melekat dalam masyarakat terlebih pada masyarakat perdesaan yang memiliki relasi sosial yang erat (I.G.A.W. Upadan, 2017);Cuesta, 2008). Dalam

konteks pengelolaan hutan sosial oleh KTH Ranu Makmur dan Alam Subur, di mana modal sosial menjadi roda penggerak bagi kelompok dalam mengelola hutan sebagai ladang mata pencaharian kelompok, melalui modal sosial kelompok dapat menghadapi berbagai permasalahan secara kolektif seperti halnya ketika anggota kelompok mengalami kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan pertanian seperti benih kopi, pupuk dan pestisida maka anggota kelompok lain yang memiliki jaringan akan membantu anggota kelompok lain untuk mendapatkan akses kebutuhan pertanian.

Konsep modal sosial telah digunakan pada berbagai tingkatan mulai dari negara, kota, komunitas, rumah tangga dan individu. Bagi Coleman dan Bordieu, modal sosial merupakan atribut yang melekat pada individu, sedangkan bagi Robert C. Putnam lebih memperlakukan modal sosial sebagai atribut komunitas (Ido, 2019);Subagyo & Legowo, 2021). Pemanfaatan modal sosial dalam pengelolaan hutan sosial dapat dilihat sebagai atribut komunitas, namun juga dapat dilihat sebagai atribut individu. Sebagai atribut komunitas, modal sosial yang melekat dalam KTH Ranu Makmur dan Alam Subur terbukti memiliki kontribusi yang berarti, seperti halnya jaringan dan nilai/norma di mana jaringan yang dimiliki oleh kelompok seperti hubungan kemitraan dengan perusahaan kopi nasional PT Indokom Citra Persada, sehingga kelompok mampu mengoptimalkan hasil panen kopinya. Secara individu seperti ketua kelompok yang memiliki relasi yang cukup kuat dengan berbagai stakeholder, merupakan representasi dari modal sosial dari aspek individu.

Nilai-nilai sosial/norma dalam modal sosial dapat menjadi aturan bersama yang disepakati oleh suatu komunitas (Sabar et al., 2022). Perencanaan pengelolaan hutan, telah ditetapkan aturan-aturan yang disepakati bersama oleh semua anggota kelompok, adanya kesepakatan bersama antar anggota kelompok

dalam pembuatan aturan pengelolaan hutan menggambarkan bahwa anggota kelompok mematuhi peraturan yang telah dibuat secara kolektif.

Aspek kepercayaan (*trust*) merupakan aspek modal sosial yang melekat antar anggota Kelompok Tani Hutan Ranu Makmur dan Alam Subur, pengurus, aparat desa dan stakeholder lain dalam pengelolaan hutan. Dengan adanya kepercayaan tersebut, pengelolaan hutan menjadi lebih efektif dan menghadirkan manfaat secara kolektif. Kepercayaan (*trust*) dalam modal sosial berperan penting dalam terciptanya kerjasama yang baik serta, menciptakan kohesivitas sosial (Muarif & Satriyati, 2023); Prasetyo et al., 2023), (Suparyana et al., 2022); Azhari Evendi, 2021). Kepercayaan yang tinggi antar elemen masyarakat, tidak hanya berdampak pada kemajuan kelompok dalam mengelola hutan sosial, namun juga menciptakan kohesivitas sosial. Dengan adanya kepercayaan penuh kepada pengurus kelompok, pada akhirnya pengurus dapat memperluas relasi kemitraan dengan berbagai pihak. Bahkan KTH Ranu Makmur dan Alam Subur telah mendapatkan izin konsesi pemanfaatan lahan hutan oleh PT Paiton Energi melalui program Tanggung Jawab Sosialnya, yang juga bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Perhutani. KTH Ranu Makmur dan Alam Subur juga didorong untuk menjadi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) oleh PT Paiton Energi, yang tujuannya ialah dapat menjadi mitra perusahaan dalam hal pemenuhan bahan bakar biomassa.

Adanya jaringan (*networking*) dalam aktivitas pengelolaan hutan oleh KTH Ranu Makmur dan Alam Subur, menggambarkan bahwa kelompok memanfaatkan modal sosial. Jaringan sosial dalam aktivitas pengelolaan hutan dapat terlihat dengan adanya partisipasi anggota kelompok dalam berbagai kegiatan. Partisipasi individu dan anggota kelompok

untuk terlibat dalam suatu jaringan hubungan sosial, merupakan wujud keberhasilan dalam modal sosial (Azhari Evendi, 2021); Ido, 2019). Adanya izin konsesi yang diberikan oleh KLHK kepada kelompok, merepresentasikan bahwa kelompok memiliki jaringan yang kuat dengan eksternal, sementara dari internal kelompok anggota kelompok memiliki partisipasi yang kuat dalam berjejaring sehingga setiap anggota kelompok memiliki pengetahuan yang sama, seperti halnya pengetahuan tentang komoditas kopi yang masuk dalam kategori kopi ekspor dan melalui jejaring sosial, anggota kelompok tidak mengalami kesulitan dalam menghadapi kendala dalam melakukan aktivitas pertaniannya.

Hubungan resiprokal merupakan komponen penting berikutnya dalam modal sosial, resiprokal/resiprositas adalah hubungan saling tukar menukar kebaikan antar individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Dasar dari hubungan resiprokal ialah nilai altruisme, di mana keinginan membantu karena tujuan membantu, dan akan ada balasan kebaikan pula (Sudarwati, 2015); Kurnianto Tjahjono, 2017). Dalam konteks pengelolaan hutan oleh KTH Ranu Makmur dan Alam Subur, hubungan resiprokal tergambar dalam aktivitas individu dan kelompok. Seperti pada saat akan melakukan penanaman, di mana antar anggota kelompok saling membantu satu sama lain sehingga biaya untuk pertanian bisa ditekan. Dengan demikian dalam sistem pertanian hutan yang dijalankan oleh KTH Ranu Makmur dan Alam Subur, sangat meminimalisir biaya karena salah satunya ialah adanya hubungan resiprokal yang kuat dalam kelompok.

Gambaran Kewiralembagaan Pada KTH Ranu Makmur dan Alam Subur dalam Pengelolaan Hutan Sosial

Istilah kewiralembagaan (*institutional entrepreneurship*) adalah istilah yang berbeda dari kewiralembagaan dalam konteks bisnis.

Dalam kewirausahaan, terdapat tindakan dari para aktor dalam menciptakan atau mengembangkan lembaga yang inovatif, sehingga dalam kewirausahaan bisnis bukan orientasi utama namun bagaimana lembaga wirausaha dapat menghadirkan kebermanfaatannya yang lebih luas (Sucipto & Zulkifli, 2021); Kusworo, 2015); Rohmawati, 2018). Pengelolaan hutan oleh KTH Ranu Makmur dan Alam Subur, tidak terlepas dari adanya faktor kewirausahaan di mana pendiri kelompok yang lebih memiliki jejaring/relasi lebih luas, kemudian tidak hanya menggunakan jejaring tersebut untuk orientasi bisnis pribadi, namun jejaring yang dimiliki dimanfaatkan untuk kepentingan kolektif. Pembentukan Kelompok Tani Hutan merupakan inisiatif dari pendiri kelompok, untuk mendapatkan izin pengelolaan lahan hutan. Pendiri kelompok juga yang kemudian mengurus berbagai kelengkapan administrasi perijinan. Inisiatif pendiri KTH Ranu Makmur dan Alam Subur ialah, agar dapat memanfaatkan lahan hutan sebagai ladang mata pencaharian untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdirinya KTH Ranu Makmur dan Alam Subur tidak terlepas dari adanya tujuan, fungsi dan formasi yang digagas oleh pendiri kelompok. Tujuan utama pendirian KTH adalah mensejahterakan masyarakat yang berada disekitar hutan Tiris Kabupaten Probolinggo, melalui pemanfaatan lahan hutan untuk lahan pertanian. Fungsi pendirian KTH ialah untuk mewedahi masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian, agar dapat mengelola hutan. Dan sebagai sebuah lembaga maka terdapat formasi atau susunan kepengurusan yang masing-masing bagiannya memiliki peran dan tanggung jawab. Sebagaimana dijelaskan oleh (Akhmad Khoerul Muna, 2024); Tiberius et al., 2020). Bahwa sebuah institusi tidak dapat dipisahkan dari tiga elemen penyusun yakni tujuan, formasi dan fungsi. Dengan demikian seorang pendiri lembaga/wirausahawan

harus memiliki inovasi dan berpikir untuk mengembangkan institusi. Dalam konteks pendirian KTH Ranu Makmur dan Alam Subur, peran seorang pendiri kelompok sangat sentral seperti halnya ketika pendiri kelompok menjalin hubungan kemitraan dengan perusahaan kopi nasional, di mana hal tersebut merupakan sebuah inisiatif agar komoditas kopi yang menjadi unggulan kelompok dapat terserap pasar dan menjadi kopi yang berkualitas ekspor. Inovasi untuk mengembangkan produk kopi juga dilakukan oleh KTH Alam Subur, yang pada saat ini masih dalam proses inovasi pembuatan olahan kopi.

Terdapat relasi antara individu/aktor dengan struktur (eksternalitas) yang kemudian terhubung ke dalam ruang IION (*Individual-Institutional Opportunity Nexus*). Antara aktor dan struktur berada pada posisi yang berbeda, namun memiliki hubungan pada aspek-aspek tertentu serta memiliki kapasitas untuk menciptakan lembaga inovatif (Tiberius et al., 2020); Akhmad Khoerul Muna, 2024); Gasbarro et al., 2018). Kapasitas pendiri KTH Ranu Makmur dan Alam Subur, yang ditunjukkan dengan adanya jejaring/relasi yang kuat dengan berbagai stakeholder seperti perusahaan kopi, pemerintah dalam hal ini KLHK dan Perhutani, adalah wujud bahwa pengelolaan hutan sosial dapat terlaksana dengan baik, ketika seorang wirausahawan mampu mengerahkan kapasitas dan sumberdayanya.

Dengan demikian, pengelolaan hutan oleh KTH Ranu Makmur dan Alam Subur tidak terlepas dari faktor modal sosial dan kewirausahaan. Pemanfaatan modal sosial dalam kelompok, memudahkan bagi kelompok dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Disamping itu KTH sebagai lembaga inovatif, merupakan bentuk kontribusi dari inisiator/pendiri KTH yang disebut sebagai wirausahawan yang telah mengerahkan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki.

KESIMPULAN

Pemanfaatan modal sosial oleh KTH Ranu Makmur dan Alam Subur dalam mengelola hutan sosial, telah berkontribusi bagi kelompok dalam mengelola kawasan hutan sebagai lahan pertanian. Kepercayaan (*trust*) antar anggota kelompok dan pengurus merupakan kunci dalam keberhasilan kelompok, nilai/norma yakni gotong royong yang cukup kuat merupakan modal penting bagi kelompok dalam menghadapi persoalan bersama, seperti ketika mengalami gagal panen maka kelompok mencari solusi bersama. Jejaring (*networking*) merupakan modal penting selanjutnya bagi kelompok, di mana saat ini kelompok telah memiliki hubungan kemitraan dengan perusahaan kopi PT Indokom Citra Persada untuk memasarkan komoditas kopi. Dan modal penting berikutnya adalah hubungan atas dasar altruisme (*resiprositas*), seperti pada saat melakukan aktivitas pertanian penanaman dan melakukan panen, maka antar anggota kelompok saling berganti membantu sehingga menekan biaya produksi. Faktor kewirausahaan dalam KTH Ranu Makmur dan Alam Subur ialah, pendirian kelompok dilandasi oleh orientasi sosial dan inovasi oleh pendirinya, sehingga kohesivitas sosial dalam kelompok cukup kuat.

Program hutan sosial yang di inisiasi oleh PT Paiton Energi sebagai perusahaan penyuplai listrik berbasis PLTU, telah berkontribusi dalam pengembalian fungsi lahan dan menghindarkan dari ancaman bencana, disamping itu program hutan sosial telah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan melalui pemanfaatan hutan sebagai sumber mata pencaharian.

Penelitian ini perlu mengkaji lebih luas lagi terkait relasi kemitraan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang menerima program hutan sosial. Hubungan kemitraan dengan PT Paiton Energi untuk memenuhi sumber energi biomassa, merupakan relasi kemitraan yang menarik

untuk dikaji sehingga peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya mengkaji tentang relasi kemitraan antara KTH dengan PT Paiton Energi terkait program hutan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Muna, A.K. (2024). Kewirausahaan dalam Pengelolaan Pertanian Secara Alami Menjadi Daya Tarik Wisata di Desa Giritengah, Borobudur. *Indonesian Journal of Tourism Business and Entrepreneurship*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.31002/ijtbe.v1i1.1462>
- Evendi, A., Sayuti, R., dan Inderasari, O.P. (2021). Modal Sosial Masyarakat Pulau Maringgik dalam Menghadapi Bencana. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v3i1.57>
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (3rd ed.). Pustaka Pelajar.
- Cuesta, J. (2008). *Social capital, crime and welfare*. 37–56. <https://doi.org/10.4324/9780203887837.ch3>
- Gasbarro, F., Rizzi, F., & Frey, M. (2018). Sustainable institutional entrepreneurship in practice: Insights from SMEs in the clean energy sector in Tuscany (Italy). *International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research*, 24(2), 476–498. <https://doi.org/10.1108/IJEER-11-2015-0259>
- Hardy, C., & Maguire, S. (2018). Institutional Entrepreneurship and Change in Fields. *The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism, February 2016*, 261–280. <https://doi.org/10.4135/9781446280669.n11>
- Hari Kristianto, A. (2020). SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM KONSEP GREEN ECONOMY UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI BERKUALITAS BERBASIS EKOLOGI. *Business, Economics and Entrepreneurship*, 2(1), 27–38. <https://doi.org/10.46229/b.e.e.v2i1.134>
- Upadani, I.G.A.W. (2017). Model Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Pemberdayaan

- Masyarakat Pedesaan Mengelola Daerah Aliran Sungai (Das) Di Bali. *Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 1(No. 1: 2017), 11–22. <https://doi.org/10.22225/wicaksana.1.1.2.017.11-22>
- Ido, A. (2019). The effect of social capital on collective action in community forest management in cambodia. *International Journal of the Commons*, 13(1), 777–803. <https://doi.org/10.18352/ijc.939>
- Institutional, H. R. M., For, E., & Organizations, S. B. (n.d.). *To appear in Human Resource Management Review (in press)*. 1–66.
- Kurnianto Tjahjono, H. (2017). Modal Sosial sebagai Properti Individu: Konsep, Dimensi dan Indikator. *JBTI : Jurnal Bisnis Teori Dan Implementasi*, 8(2), 184–189. <https://doi.org/10.18196/bti.82092>
- Kusworo, H. A. (2015). *Framing poverty Framing Poverty An institutional entrepreneurship approach to poverty alleviation through tourism*. PhD thesis. University of Groningen.
- Marco-Fondevila, M., et. al (2018). CSR and green economy: Determinants and correlation of firms' sustainable development. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 25(5), 756–771. <https://doi.org/10.1002/csr.1492>
- Mikhno, I., et. al (2021). Green Economy In Sustainable Development And Improvement Of Resource Efficiency. *Central European Business Review*, 10(1), 99–113. <https://doi.org/10.18267/j.cebr.252>
- Muarif, S., & Satriyati, E. (2023). Modal Sosial Peramu Jamu Madura Dalam Membangun Trust Relation Dengan Pelanggan. *DIMENSI- Journal of Sociology*. <https://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/view/21639%0Ahttps://journal.trunojoyo.ac.id/dimensi/article/download/21639/8473>
- Denzin, N.K. & Lincoln, Y.S. (2012). *Handbook Of Qualitative Research* (1st ed.). Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, N. E., Prayitno, G., & Dinanti, D. (2023). Karakteristik Modal Sosial dan Resiprositas Masyarakat Desa Plosorejo dengan Wisata Kampung Coklat. *Planning for Urban Region and Environmen*, 12(3), 215–224. <https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/587>
- Rohmawati, D. (2018). Kewirausahaan dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Bank Sampah Gemah Ripah, Badegan, Bantul. *Jurnal Studi Pemuda*, 4(2), 296. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.36814>
- Sabar, A., Dassir, M., & Ita, S. E. N. (2022). Modal Sosial Masyarakat Pengelolaan HutanKemasyarakatan (Hkm) Buhung Lali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Kehutanan Papuasias*, 8(1), 94–101. <https://doi.org/10.46703/jurnalpapuasias.Vol8.Iss1.294>
- Subagyo, R., & Legowo, M. (2021). Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Penamas*, 181–202. <http://blajakarta.kemenag.go.id/journal/index.php/penamas/article/view/518/218>
- Sucipto, A., & Zulkifli, Z. (2021). Analisis Kewirausahaan Desa Wisata dalam Pengembangan Desa Wisata Kedang Ipil. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 8, 89. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2021.v08.i01.p05>
- Syafitri, A., & Sudarwati, L. (2015). Pemanfaatan Modal Sosial Dalam Sektor Perdagangan. *Jurnal Perspektif Sosiologi*, 3(1), 4. <https://media.neliti.com/media/publications/156618-ID-pemanfaatan-modal-sosial-dalam-sektor-pe.pdf>
- Suparyana, P. K., et. al (2022). Modal Sosial Kemitraan Kelompok Petani Di Kawasan Hutan Rarung Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Hutan Tropis*, 10(1), 1. <https://doi.org/10.20527/jht.v10i1.13082>
- Susetiawan dkk. (2022). Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan: Jejak Pemikiran, Pendekatan, dan Isu Kontemporer. In M. L. P. Susetiawan, Bahrudin (Ed.), *State of The Arts Series* (1st ed., p. 524). Gadjah Mada University Press.
- Tiberius, V., Rietz, M., & Bouncken, R. B. (2020). Performance analysis and science mapping

of institutional entrepreneurship research.
Administrative Sciences, 10(3).

<https://doi.org/10.3390/admsci10030069>

Neuman, W. L. (2013). *Metodologi penelitian sosial: Pendekatan kualitatif dan kuantitatif* (Edisi ke-7). PT. Indeks.